

PENGUATAN KEPEMIMPINAN ENTREPRENEURIAL PEREMPUAN BERBASIS NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN ORGANISASI WANITA NU

Mona Novita

Universitas Nurul Jadid

Email: monanovita@unuja.ac.id

Abstract

Strengthening women's entrepreneurial leadership based on Islamic values is a strategic need for rural religious organizations in promoting independence and sustainability of empowerment programs. This article aims to analyze the contribution of the Service Learning (SL)-based Community Service (PkM) program in strengthening women's entrepreneurial leadership in the NU Women's Organization in Tirta Mulya Village. The program is designed to be integrated with the Islamic Educational Leadership course and involves students as co-learners and learning facilitators at each SL stage, including pre-service, action/service, reflection, and evaluation. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through participant observation, interviews, reflective discussions, and activity documentation. Data analysis was conducted thematically to identify changes in leadership capacity, community entrepreneurship practices, and organizational governance. The results of the PkM indicate that the implementation of SL effectively drives change at three levels. At the individual level, participants experienced an increased understanding and attitude of entrepreneurial leadership. At the group level, there was increased participation, collaboration, and collective role sharing in community entrepreneurship practices. At the organizational level, there was a shift in orientation from administrative management to a more planned and sustainability-oriented program-based governance. Structured reflection based on Islamic values—such as amanah (trust), deliberation, and muhasabah serves as an ethical foundation that strengthens the legitimacy and accountability of women's entrepreneurial leadership. These findings confirm that service learning not only impacts individual capacity building but also generates capacity development at the organizational level. This article contributes to the development of an integrative, potentially replicable, service learning-based community service model for women's faith-based organizations. It also provides policy implications for universities and the Institute for the Development of Women's Empowerment (LP2M) in mainstreaming service learning as a service strategy based on reflective learning and values.

Keywords: *Service learning, entrepreneurial leadership, women, Islamic values, community service*

Abstrak

Penguatan kepemimpinan entrepreneurial perempuan berbasis nilai Islam menjadi kebutuhan strategis bagi organisasi keagamaan perdesaan dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan program pemberdayaan. Artikel ini bertujuan menganalisis kontribusi program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis *Service Learning* (SL) dalam memperkuat kepemimpinan entrepreneurial perempuan pada organisasi Wanita NU Desa Tirta Mulya. Program dirancang terintegrasi dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam dan melibatkan mahasiswa sebagai *co-learner* serta fasilitator pembelajaran pada setiap tahapan SL, meliputi pra-layanan,

aksi/pelayanan, refleksi, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara, diskusi reflektif, dan dokumentasi kegiatan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi perubahan kapasitas kepemimpinan, praktik kewirausahaan komunitas, dan tata kelola organisasi. Hasil PkM menunjukkan bahwa penerapan SL efektif mendorong perubahan pada tiga level. Pada level individu, peserta mengalami peningkatan pemahaman dan sikap kepemimpinan entrepreneurial. Pada level kelompok, terjadi penguatan partisipasi, kolaborasi, dan pembagian peran kolektif dalam praktik kewirausahaan komunitas. Pada level organisasi, terlihat pergeseran orientasi dari pengelolaan administratif menuju tata kelola berbasis program yang lebih terencana dan berorientasi keberlanjutan. Refleksi terstruktur berbasis nilai Islam—seperti amanah, musyawarah, dan muhasabah berfungsi sebagai fondasi etis yang memperkuat legitimasi dan akuntabilitas kepemimpinan entrepreneurial perempuan. Temuan ini menegaskan bahwa *Service Learning* tidak hanya berdampak pada penguatan kapasitas individu, tetapi juga menghasilkan *capacity development* pada level organisasi. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan model PkM berbasis SL yang integratif dan berpotensi direplikasi untuk organisasi perempuan berbasis keagamaan, sekaligus memberikan implikasi kebijakan bagi perguruan tinggi dan LP2M dalam pengarusutamaan SL sebagai strategi pengabdian berbasis pembelajaran reflektif dan nilai.

Kata kunci: Service Learning, kepemimpinan entrepreneurial, perempuan, nilai Islam, pengabdian kepada masyarakat

PENDAHULUAN

Penguatan kapasitas organisasi perempuan berbasis komunitas menjadi isu strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi, terutama ketika organisasi tersebut berperan sebagai social engine yang menghubungkan keluarga, pendidikan nilai, dan ekonomi rumah tangga. Di berbagai konteks global, studi tentang kewirausahaan perempuan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan usaha, ketahanan ekonomi keluarga, serta daya lenting komunitas menghadapi guncangan sosial-ekonomi (Bullough & Renko, 2017; Henry et al., 2016). Namun, kapasitas kepemimpinan kewirausahaan perempuan tidak tumbuh otomatis; ia membutuhkan ekosistem pembelajaran, dukungan sosial, dan legitimasi nilai yang selaras dengan kultur komunitas (Tlaiss, 2019). Pada masyarakat religius, legitimasi tersebut seringkali bertumpu pada nilai-nilai agama yang membentuk etika kerja, motivasi, dan orientasi kebermanfaatan (masalah) dalam praktik kewirausahaan (ChoudhuryKaul et al., 2023; Hendrayati, 2025).

Dalam konteks Indonesia, organisasi perempuan Nahdlatul Ulama (Wanita NU) memegang posisi penting sebagai wadah pembinaan sosial-keagamaan sekaligus penggerak pemberdayaan berbasis jamaah. Karakter organisasi yang mengakar pada struktur komunitas menjadikan Wanita NU potensial sebagai simpul penguatan kemandirian ekonomi berbasis nilai Islam: amanah, kejujuran, tanggung jawab, kerja sama (*ta'awun*), musyawarah (*shura*), dan evaluasi diri (*muhasabah*). Nilai-nilai ini sejalan dengan literatur mengenai faith-based social entrepreneurship yang menegaskan bahwa organisasi keagamaan memiliki modal sosial, jaringan, serta trust komunitas yang

kuat untuk menggerakkan perubahan sosial dan ekonomi (Rachmawati, 2021; Thoha, 2023).

Meski demikian, berbagai program pemberdayaan perempuan berbasis organisasi keagamaan kerap menghadapi persoalan berulang: kegiatan pelatihan bersifat event-based, menekankan pengetahuan normatif, tetapi kurang memastikan transformasi praktik dan penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat organisasi. Dampaknya, pengurus dan anggota sering memahami “kewirausahaan” hanya sebagai keterampilan produksi atau pemasaran, belum sebagai kemampuan memimpin perubahan, mengelola tim, membangun jejaring, mengelola konflik, serta memantapkan tata kelola usaha komunitas. Padahal, pendekatan entrepreneurial leadership menempatkan kewirausahaan sebagai proses kepemimpinan: menginisiasi peluang, menggerakkan anggota, mengelola sumber daya terbatas, dan menciptakan nilai ekonomi-sosial secara berkelanjutan (Renko et al., 2015; Tlaiss, 2019). Kerangka ini penting untuk organisasi perempuan karena dinamika yang dihadapi bukan hanya teknis bisnis, tetapi juga negosiasi peran domestik–publik, akses jaringan, serta tantangan sosial-budaya yang sering melahirkan “beban ganda” (Althalathini et al., 2021; Jennings & Brush, 2013).

Kajian kewirausahaan perempuan Muslim secara khusus menunjukkan bahwa religiusitas dan nilai Islam bukan sekadar identitas, melainkan faktor yang membentuk motivasi, orientasi keberkahan (*barakah*), serta batasan etis dan sosial dalam pengambilan keputusan usaha (ChoudhuryKaul et al., 2023; Ode et al., 2025). Dalam model kewirausahaan perempuan Muslim, nilai Islam dapat menjadi sumber ketahanan psikologis, etika bisnis, sekaligus modal sosial yang memperkuat reputasi dan kepercayaan pelanggan (Anwar et al., 2024; Hendrayati, 2025). Namun, literatur juga menegaskan adanya kesenjangan antara “nilai yang diyakini” dan “nilai yang dipraktikkan” karena keterbatasan literasi bisnis, akses pendampingan, dan minimnya ruang belajar yang mengintegrasikan refleksi nilai dengan praktik kewirausahaan (Lorenza et al., 2024; Ode et al., 2025).

Berangkat dari konteks tersebut, program Pengabdian kepada Masyarakat ini ditempatkan pada kebutuhan strategis: (1) memperkuat kapasitas kepemimpinan entrepreneurial pengurus dan anggota Wanita NU sebagai penggerak perubahan ekonomi berbasis komunitas, (2) menaatkan peningkatan keterampilan kewirausahaan dengan tata kelola organisasi (perencanaan, pembagian peran, koordinasi, monitoring), serta (3) memperdalam internalisasi nilai Islam melalui praktik, refleksi, dan pembiasaan kepemimpinan etis. Agenda ini menjadi semakin relevan pada komunitas desa, karena kemandirian organisasi perempuan berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi keluarga, peningkatan partisipasi sosial, dan keberlanjutan program komunitas lintas generasi (Bullough & Renko, 2017; World Bank, 2020).

Dari sisi desain intervensi, banyak program PkM kewirausahaan berhenti pada pelatihan satu arah dan pendampingan singkat. Karena itu, artikel ini menegaskan penggunaan *Service-Learning* (SL) sebagai pendekatan metodologis, bukan hanya sebagai format kegiatan. SL menekankan integrasi tujuan akademik–pengabdian–refleksi kritis: peserta tidak sekadar menerima materi, tetapi mengalami siklus belajar melalui

tindakan nyata di komunitas, lalu merefleksikannya untuk menghasilkan perubahan praktik dan pemaknaan (Bringle & Hatcher, 1996; Eyler & Giles, 1999; Furco, 1996). Dalam konteks penguatan kepemimpinan, SL dinilai efektif karena mendorong pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), kolaborasi, dan tanggung jawab sosial dimensi yang berkelindan dengan kompetensi kepemimpinan entrepreneurial seperti inisiatif, kemampuan mengorganisasi tim, komunikasi, dan problem-solving (Kolb, 1984; Chou et al., 2022).

Lebih jauh, penguatan program berbasis SL dianggap relevan untuk komunitas perempuan karena menyediakan ruang aman untuk praktik bertahap: mulai dari pemetaan masalah dan aset, perencanaan aksi, praktik kewirausahaan berbasis komunitas, hingga refleksi nilai dan evaluasi dampak. Studi SL dalam berbagai setting menunjukkan bahwa refleksi terstruktur (jurnal reflektif, diskusi terarah, dan umpan balik komunitas) membantu peserta mengubah pengetahuan menjadi kompetensi dan sikap, serta meningkatkan keberlanjutan tindakan pasca program (Eyler, 2002; Rahayu et al., 2017; Chou et al., 2022). Dengan demikian, SL tidak diposisikan sebagai kegiatan seremonial, melainkan mekanisme *capacity building* yang memungkinkan penguatan kepemimpinan berbasis nilai melalui proses mengalami–menganalisis–memperbaiki (Kolb, 1984).

Selain dimensi pembelajaran, SL juga sejalan dengan logika pemberdayaan berbasis organisasi komunitas: kegiatan dilakukan bersama mitra sebagai co-producer, bukan objek. Ini relevan dengan karakter organisasi perempuan NU yang memiliki struktur, jaringan, dan tradisi musyawarah; sehingga program akan lebih mudah diinstitutionalisasi menjadi kebiasaan organisasi (Rachmawati, 2021; Thoha, 2023). Dalam konteks PkM yang ditargetkan menuju publikasi Sinta 2–3, pendekatan SL juga memudahkan peneliti menjelaskan *theory of change*: bagaimana pelatihan kepemimpinan, praktik kewirausahaan komunitas, dan refleksi nilai Islam diorkestrasi untuk menghasilkan perubahan pada level individu (kompetensi), kelompok (kolaborasi), dan organisasi (tata kelola).

Berdasarkan argumentasi tersebut, artikel ini diarahkan untuk mengisi kekosongan praktik dan kajian PkM yang masih terbatas pada pelatihan kewirausahaan perempuan secara umum, dengan menawarkan penekanan yang lebih spesifik: kewirausahaan sebagai kepemimpinan (*entrepreneurial leadership*) dan nilai Islam sebagai kerangka etik–spiritual yang diinternalisasi melalui siklus *Service-Learning*. Tujuan utama pengabdian adalah: (1) meningkatkan kapasitas kepemimpinan entrepreneurial pengurus dan anggota Wanita NU, (2) memperkuat tata kelola program kewirausahaan berbasis komunitas di tingkat organisasi, dan (3) menumbuhkan praktik reflektif nilai Islam (amanah, shura, muhasabah) sebagai budaya kepemimpinan organisasi. Dengan kerangka itu, kontribusi artikel ini tidak hanya pada aspek luaran pelatihan, tetapi juga pada model implementasi PkM berbasis SL yang dapat direplikasi pada organisasi perempuan berbasis keagamaan di wilayah perdesaan.

METODE PENELITIAN

Desain Pengabdian

Pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan *Service Learning* (SL), yaitu model pengabdian yang mengintegrasikan aktivitas pelayanan kepada komunitas dengan proses pembelajaran reflektif dan penguatan kapasitas mitra secara berkelanjutan. SL tidak diposisikan sebagai metode pelatihan konvensional, melainkan sebagai kerangka pedagogis yang menempatkan pengalaman nyata komunitas sebagai sumber utama pembelajaran dan transformasi kompetensi (Bringle & Hatcher, 1996; Eyler & Giles, 1999).

Dalam literatur internasional, *Service Learning* dipahami sebagai pendekatan yang menghubungkan *academic learning*, *community service*, dan *critical reflection* secara simultan, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual, tetapi juga mengembangkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan kemampuan problem solving berbasis konteks riil (Furco, 1996; Eyler, 2002). Model ini terbukti efektif dalam penguatan kapasitas kepemimpinan karena memungkinkan terjadinya proses belajar berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang mendorong internalisasi nilai, pengambilan keputusan kolaboratif, dan pembentukan kesadaran etis (Kolb, 1984; Chou et al., 2022).

Pendekatan SL dipilih secara sadar karena relevan dengan tujuan pengabdian, yaitu penguatan kepemimpinan entrepreneurial perempuan berbasis nilai-nilai Islam. Studi tentang *entrepreneurial leadership* menegaskan bahwa kepemimpinan kewirausahaan tidak cukup dibangun melalui transfer pengetahuan atau pelatihan teknis, melainkan melalui pengalaman memimpin, mengelola ketidakpastian, membangun kerja tim, serta merefleksikan nilai dan etika dalam praktik nyata (Renko et al., 2015; Bullough & Renko, 2017). Dalam konteks organisasi perempuan berbasis komunitas, SL menyediakan ruang aman bagi peserta untuk belajar memimpin melalui tindakan kolektif dan refleksi bersama, bukan melalui simulasi semata.

Lebih lanjut, dalam konteks kewirausahaan perempuan Muslim, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah (*shura*), dan evaluasi diri (*muhasabah*) berperan penting dalam membentuk orientasi kepemimpinan dan etika kewirausahaan (Tlaiss, 2019; ChoudhuryKaul et al., 2023; Hendrayati, 2025). Namun, literatur juga menegaskan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif nilai agama dan penerapannya dalam praktik organisasi dan kewirausahaan, terutama ketika proses pembelajaran tidak memberikan ruang refleksi yang terstruktur (Ode et al., 2025; Lorenza et al., 2024). Oleh karena itu, SL dipandang relevan karena menempatkan refleksi sebagai elemen inti, bukan pelengkap.

Secara operasional, *Service Learning* dalam pengabdian ini dirancang melalui empat tahapan utama, yaitu pra-layanan (*pre-service*), aksi/pelayanan (*service action*), refleksi (*reflection*), dan evaluasi (*evaluation*). Model tahapan ini merujuk pada kerangka SL yang dikembangkan oleh Bringle dan Hatcher (1996) serta Eyler dan Giles (1999), yang menekankan kesinambungan antara persiapan, tindakan, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan.

Tahap pra-layanan (*pre-service*) berfungsi sebagai fase diagnostik dan perencanaan, di mana kebutuhan, potensi, dan tantangan mitra diidentifikasi secara partisipatif. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian bersifat

kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata komunitas, bukan agenda eksternal semata (Furco, 1996; Rahayu et al., 2017).

Tahap aksi/pelayanan (*service action*) merupakan inti dari proses pembelajaran, di mana peserta terlibat langsung dalam pelatihan kepemimpinan dan praktik kewirausahaan berbasis komunitas. Pada tahap ini, peserta tidak hanya mempraktikkan keterampilan kewirausahaan, tetapi juga belajar memimpin, berkoordinasi, dan mengambil keputusan dalam situasi nyata, yang merupakan karakter utama dari kepemimpinan entrepreneurial (Renko et al., 2015; Chou et al., 2022).

Tahap refleksi (*reflection*) dirancang secara terstruktur melalui diskusi kelompok dan dialog reflektif. Refleksi diposisikan sebagai mekanisme untuk mengaitkan pengalaman praktik dengan nilai-nilai Islam dan prinsip kepemimpinan organisasi. Eylar (2002) menegaskan bahwa refleksi merupakan elemen kunci SL yang memungkinkan peserta mengubah pengalaman menjadi pembelajaran bermakna dan berkelanjutan. Dalam konteks pengabdian ini, refleksi berfungsi untuk memperdalam internalisasi nilai Islam sebagai dasar kepemimpinan entrepreneurial perempuan.

Tahap evaluasi (*evaluation*) dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan pengabdian dan dampak awal program terhadap kapasitas kepemimpinan dan kemandirian organisasi. Evaluasi juga digunakan sebagai dasar perumusan rekomendasi keberlanjutan program, sejalan dengan prinsip SL yang menekankan *continuous improvement* dan keberlanjutan dampak sosial (Bringle & Hatcher, 1996; Furco, 1996).

Dengan desain tersebut, *Service Learning* dalam pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai metode pelaksanaan kegiatan, tetapi sebagai kerangka konseptual dan operasional untuk menjembatani pembelajaran, kepemimpinan entrepreneurial, dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam konteks organisasi perempuan berbasis komunitas. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan perubahan pada level individu, kelompok, dan organisasi secara simultan dan berkelanjutan.

Lokasi dan Mitra Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Tirta Mulya, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Mitra pengabdian adalah pengurus dan anggota organisasi Wanita Nahdlatul Ulama (NU) di tingkat desa. Mitra dipilih secara purposif dengan pertimbangan: (1) peran strategis Wanita NU sebagai organisasi perempuan berbasis keagamaan yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, (2) adanya kebutuhan penguatan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan berbasis komunitas, serta (3) potensi organisasi untuk mengembangkan program kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

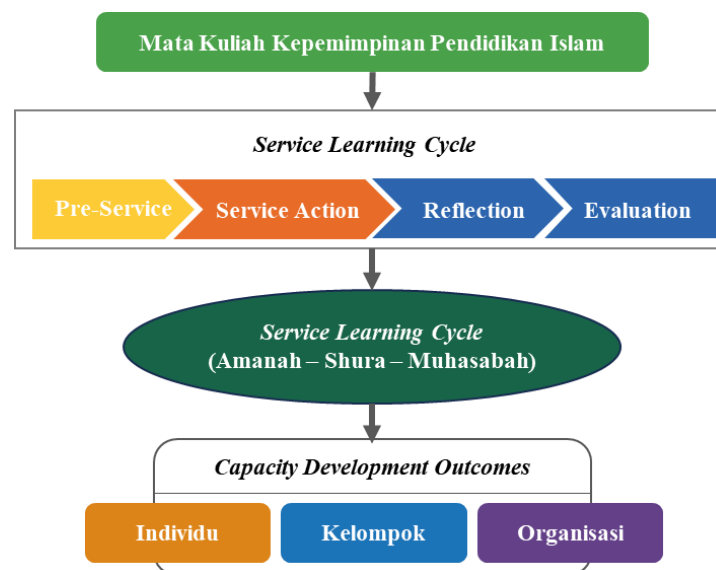
Subjek dan Partisipan Kegiatan

Partisipan kegiatan terdiri atas pengurus inti dan anggota aktif Wanita NU Desa Tirta Mulya. Pengurus berperan sebagai *key actors* dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi, sementara anggota terlibat sebagai pelaksana dan penggerak kegiatan kewirausahaan berbasis komunitas. Seluruh partisipan terlibat secara aktif dalam setiap tahapan *Service Learning*, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga refleksi dan evaluasi program.

Integrasi SL dengan Mata Kuliah & Peran Mahasiswa

Program pengabdian ini menggunakan pendekatan *Service Learning* yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Ekonomi Syariah. Integrasi ini menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran akademik sekaligus pengabdian, sehingga seluruh rangkaian kegiatan menjadi ruang belajar berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang disertai refleksi terstruktur. Sebanyak 65 mahasiswa terlibat sebagai *co-learner* dan fasilitator pada setiap tahapan *Service Learning*, yaitu pra-layanan (pemetaan kebutuhan dan observasi organisasi), aksi/pelayanan (pendampingan pelatihan dan praktik kewirausahaan komunitas), refleksi (diskusi reflektif/jurnal refleksi berbasis pengalaman lapangan), dan evaluasi (identifikasi perubahan tata kelola serta rencana keberlanjutan program bersama mitra). Keterlibatan mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan, kepekaan sosial, dan pemahaman kontekstual tentang kepemimpinan entrepreneurial berbasis nilai Islam.

Untuk memperjelas desain pengabdian dan alur implementasi *Service Learning* yang terintegrasi dengan mata kuliah serta peran mahasiswa pada setiap tahapan, model konseptual pelaksanaan program disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 1. Model Implementasi *Service Learning* Terintegrasi Mata Kuliah untuk Penguatan Kepemimpinan Entrepreneurial Perempuan Berbasis Nilai Islam

Tahapan Pelaksanaan *Service Learning*

1. Tahap Pra-Layanan (*Pre-Service*)

Tahap ini dilaksanakan pada awal Oktober 2023 dengan fokus pada pemetaan kebutuhan dan kesiapan mitra. Kegiatan meliputi koordinasi awal dengan pengurus Wanita NU, diskusi kelompok terarah untuk mengidentifikasi tantangan

kepemimpinan dan kewirausahaan organisasi, serta penyusunan materi pelatihan berbasis kebutuhan riil komunitas. Tahap ini juga digunakan untuk menyepakati bentuk kegiatan kewirausahaan komunitas yang akan dipraktikkan bersama.

2. Tahap Aksi/Pelayanan (*Service Action*)

Tahap aksi dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan entrepreneurial perempuan berbasis nilai-nilai Islam dan praktik kewirausahaan komunitas. Pelatihan mencakup penguatan pemahaman kepemimpinan entrepreneurial, peran perempuan dalam organisasi, pengelolaan usaha berbasis komunitas, serta internalisasi nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan musyawarah dalam kepemimpinan. Selanjutnya, peserta didampingi untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik kewirausahaan komunitas yang dirancang dan dijalankan secara kolektif oleh organisasi.

3. Tahap Refleksi (*Reflection*)

Refleksi dilakukan secara terstruktur melalui diskusi kelompok dan dialog reflektif yang dipandu fasilitator. Refleksi diarahkan pada pengalaman peserta selama praktik kewirausahaan, tantangan kepemimpinan yang dihadapi, serta pemaknaan nilai-nilai Islam dalam proses pengambilan keputusan dan kerja organisasi. Tahap ini menjadi inti SL karena menghubungkan pengalaman praktik dengan pembelajaran nilai dan kepemimpinan.

4. Tahap Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi dilakukan pada akhir program untuk menilai ketercapaian tujuan pengabdian dan dampak awal program terhadap kapasitas kepemimpinan dan kemandirian organisasi. Evaluasi juga digunakan untuk merumuskan rekomendasi keberlanjutan program kewirausahaan berbasis organisasi Wanita NU di tingkat desa.

Teknik Pengumpulan Data

Data pengabdian dikumpulkan menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Observasi partisipatif, untuk mengamati keterlibatan peserta, dinamika kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan selama kegiatan.
2. Wawancara semi-terstruktur, dilakukan kepada pengurus dan anggota untuk menggali persepsi, pengalaman, dan perubahan pemahaman terkait kepemimpinan entrepreneurial.
3. Dokumentasi, berupa catatan kegiatan, foto pelaksanaan, dan hasil praktik kewirausahaan komunitas.
4. Refleksi tertulis dan lisan, digunakan untuk menangkap proses internalisasi nilai dan pembelajaran peserta selama program berlangsung.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif tematik. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, pengelompokan tema, dan penarikan makna terhadap perubahan kapasitas kepemimpinan dan praktik kewirausahaan peserta. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) penguatan kepemimpinan entrepreneurial perempuan, (2) internalisasi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan organisasi, dan (3) implikasi program terhadap kemandirian organisasi Wanita NU.

Indikator Keberhasilan Program

Keberhasilan program pengabdian diukur berdasarkan:

1. Peningkatan pemahaman dan praktik kepemimpinan entrepreneurial pada pengurus dan anggota Wanita NU.
2. Terlaksananya praktik kewirausahaan berbasis komunitas yang dikelola secara kolektif oleh organisasi.
3. Terinternalisasinya nilai-nilai Islam (amanah, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, dan muhasabah) dalam proses kepemimpinan dan pengelolaan organisasi.
4. Tersusunnya rencana keberlanjutan program kewirausahaan organisasi pasca kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Service Learning* dalam program ini melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran mata kuliah, sehingga setiap tahapan pengabdian sekaligus menjadi ruang pembelajaran reflektif bagi mahasiswa dan mitra.

1. Tahap Pra-Layanan (*Pre-Service*): Diagnostik Kebutuhan dan Pemetaan Baseline Kepemimpinan–Kewirausahaan

Tahap pra-layanan dilakukan sebagai fase diagnostik untuk memotret kebutuhan mitra, menentukan fokus intervensi, dan membangun kesepahaman program antara tim pengabdian dan pengurus Wanita NU Desa Tirta Mulya. Pada fase ini, temuan awal menunjukkan bahwa Wanita NU memiliki modal sosial yang kuat dalam bentuk jejaring jamaah, solidaritas antaranggota, serta tradisi kerja kolektif berbasis kegiatan sosial-keagamaan. Namun, modal sosial tersebut belum sepenuhnya dikonversi menjadi kapasitas kewirausahaan organisasi yang dikelola secara sistematis. Setelah itu dilakukan, tim pengabdian melakukan persiapan rancangan konsep SL untuk penguatan kewirausahaan perempuan NU bersama mahasiswa peserta SL, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1: Pendampingan Perancangan Konsep SL oleh Mahasiswa Kewirausahaan untuk Komunitas Dampungan guna Penguatan Ekonomi Keluarga

Dari sisi kepemimpinan organisasi, pola kepemimpinan yang tampak pada baseline masih dominan administratif: pengurus berfokus pada kelancaran kegiatan rutin, sementara aspek pengembangan program ekonomi belum menjadi prioritas strategis. Pembagian peran pada kegiatan ekonomi (jika ada) cenderung spontan dan tidak terdokumentasi. Pada konteks organisasi komunitas, kondisi ini lazim terjadi ketika kepemimpinan belum berorientasi pada peluang dan perubahan, melainkan pada stabilitas dan rutinitas (Renko et al., 2015). Dalam kerangka *entrepreneurial leadership*, baseline ini menunjukkan bahwa dimensi “membaca peluang, membangun visi, dan menggerakkan sumber daya” belum menjadi kebiasaan organisasi.

Selain itu, pemetaan awal juga memperlihatkan bahwa pemahaman kewirausahaan pada sebagian peserta masih identik dengan “usaha pribadi” atau “keterampilan produksi”, bukan sebagai instrumen penguatan organisasi. Di titik ini, penting untuk menegaskan bahwa penguatan kewirausahaan komunitas tidak memadai jika hanya memberikan pelatihan teknis; yang lebih krusial adalah membangun kapasitas kepemimpinan yang mampu mengorkestrasi sumber daya anggota, membangun koordinasi, serta memastikan keberlanjutan program (Bullough & Renko, 2017). Untuk organisasi perempuan, urgensi ini menjadi lebih kuat karena perempuan sering menghadapi keterbatasan akses, legitimasi, dan waktu akibat peran ganda (Jennings & Brush, 2013; Henry et al., 2016). Dengan demikian, pra-layanan bukan sekadar “pra-acara”, tetapi ruang untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi berkembangnya kepemimpinan entrepreneurial.

Pada tahap ini pula, tim pengabdian bersama mitra menyepakati bahwa program harus menggabungkan tiga dimensi: (1) penguatan pemahaman kepemimpinan entrepreneurial perempuan, (2) praktik kewirausahaan berbasis komunitas yang dikelola kolektif, dan (3) refleksi terstruktur untuk internalisasi nilai-nilai Islam. Kesepakatan ini penting karena *Service Learning* menuntut integrasi pelayanan dan pembelajaran, bukan sekadar rangkaian pelatihan (Bringle & Hatcher, 1996; Furco, 1996). Dengan kata lain, pra-layanan berfungsi sebagai fondasi agar intervensi benar-benar berbasis kebutuhan mitra dan tidak terjebak pada pendekatan event-based.

Pembahasan tahap pra-layanan:

Secara konseptual, fase ini merepresentasikan prinsip SL bahwa program pengabdian harus dibangun melalui pemahaman konteks, kebutuhan, dan kapasitas komunitas agar proses pembelajaran dan pelayanan berjalan autentik (Eyler & Giles, 1999). Pada sisi kepemimpinan, baseline yang ditemukan menegaskan perlunya pergeseran dari kepemimpinan administratif menuju kepemimpinan entrepreneurial, yaitu kepemimpinan yang memobilisasi peluang dan menggerakkan organisasi melalui inovasi sosial-ekonomi (Renko et al., 2015). Pada sisi organisasi keagamaan, kekuatan modal sosial dan trust komunitas menjadi aset utama untuk transformasi program ekonomi; namun aset tersebut hanya produktif bila dipandu oleh tata kelola dan kepemimpinan yang jelas (Thoha, 2023; Rachmawati, 2021).

2. Tahap Aksi/Pelayanan (*Service Action*): Pelatihan Kepemimpinan Entrepreneurial dan Praktik Kewirausahaan Komunitas

Tahap aksi/pelayanan dimulai dengan pelatihan kepemimpinan entrepreneurial perempuan berbasis nilai Islam, dilanjutkan dengan praktik kewirausahaan berbasis komunitas yang dijalankan secara kolektif. Hasil pada tahap ini menunjukkan perubahan penting pada cara peserta memaknai kepemimpinan dan kewirausahaan. Peserta mulai memahami bahwa kewirausahaan bukan sekadar “jualan” atau “produksi”, tetapi proses menginisiasi peluang, menyusun rencana, membangun tim, mengelola peran, dan mengambil keputusan dalam keterbatasan sumber daya. Pemaknaan ini merupakan inti dari *entrepreneurial leadership* sebagai gaya kepemimpinan yang menghubungkan orientasi peluang dengan mobilisasi sosial dan organisasi (Renko et al., 2015).

Dari sisi dinamika organisasi, pelatihan diikuti oleh tumbuhnya partisipasi lebih aktif dalam tahap perencanaan usaha komunitas. Pengurus tidak hanya hadir sebagai pelaksana agenda, tetapi mulai berperan sebagai fasilitator: mendorong anggota menyampaikan ide, memetakan kapasitas, dan menyepakati pembagian tugas. Keterlibatan anggota meningkat karena mereka merasakan adanya ruang untuk berinisiatif dan berkontribusi. Kondisi ini penting karena kepemimpinan entrepreneurial pada organisasi komunitas tidak bisa dibangun melalui instruksi satu arah; ia tumbuh melalui praktik kepemimpinan kolektif, negosiasi peran, dan pembelajaran sosial (Bullough & Renko, 2017).

Praktik kewirausahaan berbasis komunitas—yang dikelola bersama—menjadi laboratorium nyata untuk pembelajaran kepemimpinan. Dalam praktik tersebut, peserta menghadapi kebutuhan koordinasi yang lebih jelas, penentuan peran, pengelolaan komunikasi, serta penyelesaian perbedaan pendapat. Proses ini menghadirkan pembelajaran yang tidak selalu muncul dalam pelatihan kelas, karena peserta mengalami langsung tantangan “memimpin program” ketimbang “mengetahui teori”. Temuan ini sejalan dengan teori *experiential learning* yang menekankan pembentukan kompetensi melalui siklus mengalami, merefleksi, memaknai, dan memperbaiki (Kolb, 1984). Studi terkait SL dalam konteks manajemen juga menunjukkan bahwa pengalaman layanan yang diikuti refleksi meningkatkan inisiatif, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial peserta (Chou et al., 2022).

Di bawah ini adalah beberapa dokumentasi terkait aksi Pelatihan Kepemimpinan Entrepreneurial dan Praktik Kewirausahaan Komunitas:



Gambar: Aksi Dampingan Penguatan Ekonomi dan Nilai Kepemimpinan Perempuan NU Pelepat Ilir, Bungo

Pembahasan tahap aksi/pelayanan:

Di tahap ini, kualitas program PkM dinilai dari perubahan perilaku kepemimpinan, bukan semata dari kelancaran pelatihan. Pada organisasi perempuan, pembelajaran berbasis praktik memberi ruang bagi peningkatan *agency* dan kepercayaan diri untuk tampil sebagai penggerak program. Literatur kewirausahaan perempuan menunjukkan bahwa kendala perempuan sering bukan pada kemampuan teknis semata, melainkan pada akses legitimasi kepemimpinan, jejaring, serta dukungan sosial (Henry et al., 2016; Jennings & Brush, 2013). Karena itu, praktik kewirausahaan kolektif berfungsi sebagai ruang penguatan legitimasi: anggota mengalami bahwa kepemimpinan perempuan dalam organisasi bukan anomali, tetapi kebutuhan program.

Selain itu, aksi/pelayanan memperlihatkan bagaimana organisasi berbasis nilai dapat mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial. Dalam perspektif organisasi keagamaan, ekonomi bukan sekadar profit, tetapi instrumen masalah komunitas—dan inilah yang membuat program kewirausahaan komunitas lebih mudah diterima secara kultural ketika dibingkai sebagai penguatan organisasi dan pemberdayaan (Rachmawati, 2021; Thoha, 2023).

3. Tahap Refleksi (*Reflection*): Internalisasi Nilai Islam sebagai Etika Kepemimpinan Entrepreneurial

Tahap refleksi dilaksanakan secara terstruktur melalui diskusi kelompok, dialog reflektif, dan perumusan pelajaran kunci dari praktik kewirausahaan komunitas. Hasil refleksi menunjukkan bahwa peserta tidak hanya mengevaluasi aspek teknis kegiatan, tetapi juga mulai mengaitkan pengalaman kepemimpinan dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah (*shura*), dan evaluasi diri (*mahasabah*). Pada tahap ini, nilai Islam berfungsi sebagai *moral compass* yang mengarahkan praktik kepemimpinan dan kewirausahaan agar tidak sekadar berorientasi pada output ekonomi, tetapi juga etika dan kebermanfaatn sosial.

Refleksi memunculkan kesadaran bahwa kepemimpinan entrepreneurial bukan hanya keberanian mengambil peluang, tetapi juga kemampuan menjaga integritas keputusan. Misalnya, ketika peserta membahas pembagian peran dan tanggung jawab, mereka mengaitkannya dengan amanah; ketika membahas transparansi pengelolaan kegiatan, mereka menautkannya dengan kejujuran; ketika membahas pengambilan keputusan kelompok, mereka menempatkan musyawarah sebagai prinsip organisasi. Proses ini menunjukkan internalisasi nilai yang berlangsung melalui pengalaman nyata, bukan ceramah normatif. Eyler (2002) menegaskan bahwa refleksi adalah komponen inti SL yang mengubah pengalaman menjadi pembelajaran bermakna dan membentuk sikap.

Pada konteks kewirausahaan perempuan Muslim, literatur menguatkan bahwa religiusitas dan nilai Islam dapat menjadi sumber motivasi, etika bisnis, serta ketahanan psikologis (Tlaiss, 2019; ChoudhuryKaul et al., 2023). Namun, sejumlah kajian juga mencatat adanya kesenjangan antara pemahaman nilai yang diyakini dan penerapannya dalam praktik organisasi dan usaha, terutama ketika pembelajaran tidak menyediakan ruang refleksi yang sistematis dan berkelanjutan (Ode et al., 2025; Lorenza et al., 2024). Temuan PkM ini menunjukkan bahwa desain SL yang memusatkan refleksi mampu

menjembatani kesenjangan tersebut: nilai Islam tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi pedoman dalam keputusan dan tata kelola kegiatan.

Pembahasan tahap refleksi:

Tahap refleksi memperlihatkan kontribusi ilmiah program: bukan hanya menghasilkan kegiatan kewirausahaan, tetapi membentuk *ethical entrepreneurial leadership*. Di banyak program PkM, refleksi sering menjadi bagian yang lemah atau sekadar laporan, padahal justru refleksi yang membedakan SL dari program pelatihan biasa (Bringle & Hatcher, 1996; Furco, 1996). Melalui refleksi, kepemimpinan entrepreneurial dipahami bukan sebagai gaya agresif mengejar peluang, melainkan kepemimpinan yang berorientasi masalah dan bertanggung jawab secara moral. Untuk organisasi perempuan berbasis keagamaan, kerangka etik ini meningkatkan legitimasi dan keberterimaan program, sekaligus memperkuat kohesi internal.

4. Tahap Evaluasi (Evaluation): Perubahan Tata Kelola, Kemandirian Organisasi, dan Logika Keberlanjutan

Evaluasi dilakukan pada akhir program untuk menilai perubahan awal pada kapasitas kepemimpinan, praktik kewirausahaan komunitas, dan tata kelola organisasi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya pergeseran orientasi organisasi; kewirausahaan mulai dipandang sebagai program strategis yang perlu direncanakan, bukan aktivitas insidental. Pengurus menunjukkan komitmen untuk memperjelas pembagian peran, menyusun mekanisme koordinasi, serta merancang monitoring sederhana agar kegiatan tidak berhenti setelah program selesai.

Dari sisi organisasi, perubahan ini dapat dibaca sebagai awal pergeseran tata kelola (*governance shift*), yakni bergerak dari pengelolaan berbasis rutinitas menuju pengelolaan berbasis program yang memiliki tujuan, pembagian peran, dan mekanisme kontrol. Pada organisasi komunitas, perubahan seperti ini penting untuk keberlanjutan karena memastikan program tidak bergantung pada figur tertentu, melainkan pada sistem kerja bersama. Bringle dan Hatcher (1996) menekankan bahwa keberhasilan *Service Learning* tidak hanya terletak pada pengalaman layanan, tetapi pada perubahan yang dapat dipelihara melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Evaluasi juga menegaskan peran organisasi keagamaan sebagai penggerak kewirausahaan sosial berbasis iman (*faith-based social entrepreneurship*). Ketika nilai agama diintegrasikan dengan tata kelola program ekonomi, organisasi memperoleh legitimasi dan kepercayaan komunitas yang memperkuat keberlanjutan program (Rachmawati, 2021; Thoha, 2023). Pada tahap ini, nilai musyawarah dan muhasabah berfungsi sebagai prinsip untuk menjaga akuntabilitas internal, terutama saat organisasi mengelola program ekonomi berbasis kolektif.

Pembahasan tahap evaluasi:

Pada pengabdian kepada masyarakat berbasis pembelajaran reflektif, evaluasi tidak seharusnya berhenti pada keterlaksanaan kegiatan semata, tetapi perlu menampilkan perubahan tata kelola dan logika keberlanjutan program. Dalam konteks ini, evaluasi diarahkan untuk mengidentifikasi apa saja perubahan yang terjadi pada pola kepemimpinan dan pengelolaan organisasi, bagaimana organisasi menjaga keberlanjutan

program pascapengabdian, serta bagaimana nilai-nilai yang diinternalisasikan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam praktik organisasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas individu, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas organisasi. *Service Learning* memperlihatkan kekuatannya sebagai pendekatan pengabdian yang mampu menghasilkan *capacity development* pada level organisasi, melalui pembiasaan refleksi, perencanaan kolektif, dan tata kelola berbasis nilai. Dalam kerangka ini, kewirausahaan berfungsi sebagai wahana pembelajaran kepemimpinan, sementara organisasi berperan sebagai ruang institusionalisasi nilai dan praktik kepemimpinan entrepreneurial berbasis Islam.

Pada pengabdian kepada masyarakat berbasis pembelajaran reflektif, evaluasi tidak seharusnya berhenti pada keterlaksanaan kegiatan semata, tetapi perlu menampilkan perubahan tata kelola dan logika keberlanjutan program. Dalam konteks ini, evaluasi diarahkan untuk mengidentifikasi perubahan pada pola kepemimpinan dan pengelolaan organisasi, strategi organisasi menjaga keberlanjutan program pascapengabdian, serta cara nilai-nilai yang diinternalisasikan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam praktik organisasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas individu, tetapi juga mendorong pengembangan kapasitas (*capacity development*) pada level organisasi melalui pembiasaan refleksi, perencanaan kolektif, dan tata kelola berbasis nilai. Dalam kerangka ini, kewirausahaan berfungsi sebagai wahana pembelajaran kepemimpinan, sementara organisasi berperan sebagai ruang institusionalisasi nilai dan praktik kepemimpinan entrepreneurial berbasis Islam.

5. Sintesis: Kontribusi Program terhadap Penguatan Kepemimpinan Entrepreneurial Perempuan Berbasis Nilai Islam

Secara keseluruhan, hasil pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan *Service Learning* (SL) efektif dalam memperkuat kepemimpinan entrepreneurial perempuan berbasis nilai Islam pada organisasi Wanita NU di tingkat desa. Efektivitas tersebut tercermin dari kemampuan SL dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis pengalaman, praktik kewirausahaan komunitas, dan refleksi nilai secara berkelanjutan. Program tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta tentang kewirausahaan, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang kepemimpinan, dari yang semula administratif dan reaktif menuju kepemimpinan entrepreneurial yang lebih proaktif, kolaboratif, dan berorientasi keberlanjutan.

Sintesis hasil menunjukkan bahwa penguatan kepemimpinan entrepreneurial berlangsung pada tiga level yang saling terkait. Pada level individu, peserta mengalami peningkatan pemahaman dan sikap kepemimpinan, terutama dalam membaca peluang, mengambil inisiatif, serta memaknai kewirausahaan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan sekadar usaha personal. Pada level kelompok, praktik kewirausahaan berbasis komunitas mendorong tumbuhnya partisipasi, kerja tim, dan koordinasi antaranggota organisasi. Sementara itu, pada level organisasi, mulai terlihat pergeseran tata kelola,

ditandai dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perencanaan program, pembagian peran, mekanisme musyawarah, serta orientasi kemandirian jangka panjang.

Kontribusi penting dari program ini terletak pada penempatan refleksi sebagai mekanisme utama internalisasi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan dan kewirausahaan. Nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah (shura), dan muhasabah tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi dioperasionalkan dalam praktik pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa *Service Learning*, ketika dirancang secara reflektif, mampu menjembatani kesenjangan antara nilai religius yang diyakini dan praktik kepemimpinan yang dijalankan (Eyler, 2002; Tlaiss, 2019).

Untuk memperjelas kontribusi program pengabdian secara komprehensif, sintesis hasil disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 merangkum keterkaitan antara tahapan *Service Learning*, bentuk intervensi yang dilakukan, hasil utama, serta makna kepemimpinan yang terbentuk pada setiap tahap. Selanjutnya, Tabel 2 menampilkan perubahan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola organisasi dengan membandingkan kondisi awal dan kondisi pascapengabdian, sehingga memberikan gambaran yang lebih operasional mengenai dampak program pada level organisasi.

Secara akademik, temuan ini memperkaya diskursus tentang keterkaitan antara entrepreneurial leadership, nilai religius, dan metode pengabdian berbasis pembelajaran reflektif (Renko et al., 2015; Eyler, 2002). Dari sisi praktik PkM, artikel ini menawarkan model implementasi *Service Learning* yang relevan dan aplikatif bagi organisasi perempuan berbasis keagamaan di wilayah perdesaan, dengan penekanan bahwa kewirausahaan perlu dipahami sebagai proses kepemimpinan yang beretika dan berorientasi maslahat. Dengan demikian, pengabdian ini tidak berhenti pada laporan kegiatan, tetapi memberikan kerangka konseptual dan operasional yang berpotensi direplikasi pada konteks serupa.

Tabel 1. Sintesis Hasil Pengabdian Berdasarkan Tahapan Service Learning

Tahap Service Learning	Fokus Kegiatan	Hasil Utama	Makna Kepemimpinan
Pra-Layanan	Pemetaan kebutuhan dan kondisi awal organisasi	Teridentifikasi kepemimpinan administratif dan kewirausahaan yang masih individual	Menunjukkan kebutuhan transformasi menuju kepemimpinan entrepreneurial
Aksi/Pelayanan	Pelatihan kepemimpinan dan praktik kewirausahaan komunitas	Meningkatnya partisipasi, inisiatif, dan pembagian peran kolektif	Kewirausahaan dipahami sebagai proses memimpin dan menggerakkan organisasi

Tahap Service Learning	Fokus Kegiatan	Hasil Utama	Makna Kepemimpinan
Refleksi	Diskusi reflektif berbasis nilai Islam	Terinternalisasinya nilai amanah, shura, dan muhasabah dalam keputusan organisasi	Nilai Islam berfungsi sebagai fondasi etis kepemimpinan entrepreneurial Organisasi mulai
Evaluasi	Penilaian dampak dan keberlanjutan program	Muncul kesadaran tata kelola dan perencanaan program berkelanjutan	berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan

Untuk menegaskan perubahan pada level organisasi secara lebih operasional, ringkasan pergeseran kapasitas kepemimpinan dan tata kelola disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perubahan Kapasitas Kepemimpinan dan Tata Kelola Organisasi

Aspek	Kondisi Awal	Kondisi Pasca Pengabdian
Orientasi Kepemimpinan	Administratif dan reaktif	Entrepreneurial dan proaktif
Pola Kewirausahaan	Individual dan insidental	Kolektif dan terencana
Tata Kelola Organisasi	Belum terstruktur	Mulai terencana dan berbasis peran
Pengambilan Keputusan	Terbatas pada pengurus	Partisipatif melalui musyawarah
Peran Nilai Islam	Normatif dan simbolik	Operasional dan reflektif

Berdasarkan sintesis temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengabdian ini tidak hanya menghasilkan luaran kegiatan, tetapi membangun pola pembelajaran dan kepemimpinan yang bersifat transformatif pada organisasi perempuan berbasis keagamaan. *Service Learning* berfungsi sebagai mekanisme yang menjembatani pengalaman praktik kewirausahaan dengan refleksi nilai Islam, sehingga perubahan yang terjadi tidak berhenti pada individu, tetapi terinstitusionalisasi dalam dinamika kelompok dan tata kelola organisasi. Dengan kata lain, penguatan kepemimpinan entrepreneurial perempuan dalam program ini merupakan hasil dari integrasi antara proses pembelajaran reflektif, praktik kewirausahaan komunitas, dan internalisasi nilai sebagai dasar etika kepemimpinan. Temuan ini menjadi landasan untuk merumuskan kesimpulan umum dan rekomendasi strategis terkait efektivitas pendekatan *Service Learning* dalam penguatan kepemimpinan entrepreneurial perempuan berbasis nilai Islam.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini menegaskan bahwa pendekatan *Service Learning* (SL) merupakan strategi yang efektif dan relevan untuk memperkuat kepemimpinan entrepreneurial perempuan berbasis nilai Islam dalam organisasi komunitas keagamaan. Melalui integrasi tahapan pra-layanan, aksi/pelayanan, refleksi, dan evaluasi, SL memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak hanya

berorientasi pada peningkatan keterampilan kewirausahaan, tetapi juga pada transformasi cara memimpin dan mengelola organisasi.

Temuan utama menunjukkan bahwa kewirausahaan, ketika diposisikan sebagai proses kepemimpinan, menjadi wahana pembelajaran yang kontekstual bagi perempuan dalam organisasi berbasis komunitas. Peserta tidak lagi memaknai kewirausahaan sebagai aktivitas ekonomi individual, melainkan sebagai instrumen kolektif untuk menggerakkan organisasi, membangun kerja sama, dan memperkuat kemandirian berbasis nilai. Pergeseran ini menandai transisi dari kepemimpinan administratif yang berorientasi rutinitas menuju kepemimpinan entrepreneurial yang lebih proaktif, kolaboratif, dan visioner.

Proses refleksi terstruktur dalam Service Learning berperan penting dalam menjembatani nilai-nilai Islam dengan praktik kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Nilai amanah, kejujuran, musyawarah, dan muhasabah tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terinternalisasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program kewirausahaan komunitas. Dengan demikian, kepemimpinan entrepreneurial yang terbentuk tidak hanya berorientasi pada capaian ekonomi, tetapi juga pada etika, kebermanfaatan sosial, dan keberlanjutan organisasi.

Secara keseluruhan, pengabdian ini menunjukkan bahwa Service Learning mampu menghasilkan penguatan kapasitas pada tiga level sekaligus, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Kontribusi utama pengabdian tidak hanya terletak pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan, tetapi pada terbentuknya model penguatan kepemimpinan entrepreneurial perempuan berbasis nilai Islam yang bersifat kontekstual, reflektif, dan berpotensi direplikasi pada organisasi perempuan berbasis keagamaan di wilayah perdesaan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Temuan pengabdian ini memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya pada peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Keberhasilan *Service Learning* (SL) dalam memperkuat kepemimpinan entrepreneurial perempuan berbasis nilai Islam menunjukkan bahwa PkM perlu diposisikan sebagai instrumen strategis pengembangan pembelajaran, kepemimpinan, dan tata kelola sosial, bukan sekadar pemenuhan kewajiban tridarma.

Pertama, LP2M perlu mengarusutamakan *Service Learning* sebagai pendekatan kebijakan PkM melalui pedoman internal yang mendorong integrasi PkM dengan mata kuliah. Kebijakan ini memastikan keterlibatan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, keberadaan refleksi terstruktur, serta pengukuran dampak pada level individu, kelompok, dan organisasi mitra.

Kedua, integrasi PkM berbasis SL dengan kurikulum program studi perlu diperkuat secara kelembagaan. PkM tidak lagi diperlakukan sebagai kegiatan terpisah, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran kontekstual yang mendukung capaian

pembelajaran lulusan, terutama kompetensi kepemimpinan, kolaborasi, dan kepekaan sosial.

Ketiga, kebijakan monitoring dan evaluasi PkM perlu bergeser dari orientasi output ke orientasi dampak dan keberlanjutan. LP2M disarankan memasukkan indikator perubahan tata kelola mitra, internalisasi nilai, dan rencana keberlanjutan sebagai ukuran keberhasilan program.

Keempat, organisasi perempuan berbasis keagamaan dapat diposisikan sebagai mitra strategis PkM berkelanjutan, sehingga pengabdian mendorong institusionalisasi praktik kepemimpinan entrepreneurial berbasis nilai Islam. Dengan kebijakan tersebut, PkM berfungsi tidak hanya sebagai kegiatan sosial, tetapi sebagai wahana pembelajaran transformatif dan penguatan peran strategis perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan pengabdian, penguatan kepemimpinan entrepreneurial perempuan berbasis nilai Islam melalui *Service Learning* memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan pengabdian dan pembelajaran di perguruan tinggi. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi kebijakan berikut dapat dipertimbangkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

Pertama, perguruan tinggi melalui LP2M perlu menetapkan *Service Learning* sebagai salah satu pendekatan strategis dalam kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). SL tidak cukup diposisikan sebagai variasi metode, tetapi sebagai desain PkM unggulan yang terintegrasi dengan mata kuliah. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui pedoman internal LP2M yang mendorong dosen merancang PkM berbasis SL, lengkap dengan kejelasan peran mahasiswa, tahapan refleksi, dan indikator dampak pada level individu, kelompok, dan organisasi mitra.

Kedua, integrasi PkM berbasis *Service Learning* dengan kurikulum program studi perlu diperkuat secara kelembagaan. LP2M bersama fakultas dan program studi dapat mengembangkan skema PkM terintegrasi mata kuliah, sehingga kegiatan pengabdian tidak berdiri terpisah dari pembelajaran. Dalam konteks ini, PkM berbasis SL berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran lapangan yang mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL), khususnya kompetensi kepemimpinan, kepekaan sosial, dan kemampuan problem-solving kontekstual mahasiswa.

Ketiga, kebijakan penjaminan mutu PkM perlu diarahkan pada penguatan dampak dan keberlanjutan, bukan hanya keterlaksanaan kegiatan. LP2M disarankan untuk memasukkan indikator keberhasilan seperti perubahan tata kelola mitra, internalisasi nilai, dan rencana keberlanjutan program dalam instrumen monitoring dan evaluasi PkM. Pendekatan ini sejalan dengan temuan pengabdian yang menunjukkan bahwa dampak SL lebih tampak pada perubahan proses dan budaya organisasi, bukan sekadar output kegiatan.

Keempat, kampus dan LP2M dapat memposisikan organisasi perempuan berbasis keagamaan sebagai mitra strategis PkM berkelanjutan, bukan mitra satu kali kegiatan. Kemitraan jangka menengah memungkinkan institusionalisasi nilai, pembelajaran

berulang, dan replikasi praktik kepemimpinan entrepreneurial berbasis komunitas. Kebijakan ini dapat dituangkan dalam roadmap PkM berbasis komunitas yang selaras dengan visi penguatan peran sosial perguruan tinggi.

Kelima, dari sisi pengembangan keilmuan, LP2M perlu mendorong hilirisasi PkM berbasis *Service Learning* ke dalam publikasi ilmiah dan pengembangan model konseptual. Pengabdian tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban tridarma, tetapi sebagai sumber pengembangan pengetahuan kontekstual yang relevan dengan manajemen pendidikan Islam, kepemimpinan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, PkM berbasis SL berkontribusi langsung pada reputasi akademik institusi melalui publikasi bereputasi dan penguatan keunikan keilmuan kampus.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini menegaskan bahwa keberhasilan *Service Learning* dalam penguatan kepemimpinan entrepreneurial perempuan berbasis nilai Islam perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan kampus dan LP2M yang sistematis, terintegrasi, dan berorientasi dampak. Dengan dukungan kebijakan tersebut, PkM tidak hanya menjadi aktivitas sosial, tetapi instrumen strategis pengembangan pembelajaran, kepemimpinan, dan keberlanjutan pengabdian perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Althalathini, D., Apostolopoulos, N., & Al-Dajani, H. (2021). Islamic feminism and women's entrepreneurship: Empowerment and agency. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 13(4), 383–399.
- Anwar, M. K., et al. (2024). Business success of *asnâf* women entrepreneurs: Religiosity and empowerment perspectives. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 19(1), 1–22.
- Badran, M. (2009). *Feminism in Islam: Secular and religious convergences*. Oneworld.
- Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1996). Implementing service learning in higher education. *The Journal of Higher Education*, 67(2), 221–239. <https://doi.org/10.2307/2943981>
- Bullough, A., & Renko, M. (2017). A different frame of reference: Entrepreneurship and resilience in conflict environments. *Journal of Business Venturing*, 32(3), 326–345. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2017.02.003>
- Chou, H.-M., et al. (2022). The incorporation of service-learning into a management course: Evidence and reflections. *Sustainability*, 14(12), 7132. <https://doi.org/10.3390/su14127132>
- Choudhury-Kaul, S., et al. (2023). Muslim Indonesian women entrepreneurs: Values, ethics, and enterprise practice. *Journal of Islamic Marketing*, 14(6), 1500–1516.
- Clifford, J., et al. (2020). Seeing community engagement as we are: Student perceptions of service-learning and social entrepreneurship education. *International Journal of Research on Service-Learning and Community Engagement*, 8(1), 1–15.

- Clinton, I. D. E., & Thomas, T. (2012). Business students' experience of community service learning. *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*, 12(1), 51–66.
- Daou, A., et al. (2019). Islamic ethics and entrepreneurship: Pathways and debates. *Journal of Business Ethics*, 155(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3533-5>
- Eyler, J. (2002). Reflection: Linking service and learning—Linking students and communities. *Journal of Social Issues*, 58(3), 517–534. <https://doi.org/10.1111/1540-4560.00274>
- Eyler, J., & Giles, D. E. (1999). *Where's the learning in service-learning?* Jossey-Bass.
- Faulconer, E. (2020). eService-learning: A decade of research in undergraduate online service-learning. *American Journal of Distance Education*, 35(2), 100–117. <https://doi.org/10.1080/08923647.2020.1848968>
- Furco, A. (1996). Service-learning: A balanced approach to experiential education. In *Expanding boundaries: Serving and learning* (pp. 2–6). Corporation for National Service.
- Ghaliyati, A., et al. (2025). Muslim women's empowerment strategy in halal MSMEs: An Islamic community development lens. *Journal of Islamic Studies*, 36(1), 45–63.
- Hendrayati, H. (2025). Revisiting literature on women entrepreneurs and religiosity. *Cogent Business & Management*, 12(1), 1–15.
- Henry, C., Foss, L., & Ahl, H. (2016). Gender and entrepreneurship research: A review and future directions. *International Small Business Journal*, 34(3), 217–241. <https://doi.org/10.1177/0266242614528922>
- Husaini, F. (2025). Empowering female entrepreneurship through pesantren-based models. *FEBI Journal*, 7(1), 55–72.
- Insani, N. (2024). Empowering Muslim women: Bridging Islamic law and social empowerment. *Journal of Islamic Law*, 9(2), 120–138.
- Jennings, J. E., & Brush, C. G. (2013). Research on women entrepreneurs: Challenges to (and from) the broader entrepreneurship literature? *Academy of Management Annals*, 7(1), 663–715. <https://doi.org/10.5465/19416520.2013.782190>
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
- Lorenza, C., et al. (2024). Work motivation of women entrepreneurs in the Islamic perspective. *Journal of Islamic Entrepreneurship and Philanthropy*, 3(2), 89–105.
- Marlow, S., & Swail, J. (2014). Gender, risk, and finance. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 38(1), 1–19. <https://doi.org/10.1111/etap.12082>

- Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim women's quest for equality: Between Islamic law and feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629–645.
- Ode, H., et al. (2025). Development of Muslim women entrepreneurship: Islamic values shaping motivation and decisions. *Journal of Islamic Business and Economic Review*, 8(1), 1–17.
- Rachmawati, E. (2021). The roles of Islamic faith-based organizations in social empowerment in Indonesia. *Journal of Social Development*, 5(2), 101–118.
- Rahayu, N., et al. (2017). Students' self-reflection on service-learning programs. *Proceedings of ICTTE*, Universitas Negeri Semarang.
- Ramadani, V., Dana, L.-P., et al. (Eds.). (2021). *Entrepreneurship and management in an Islamic context*. Springer.
- Renko, M., et al. (2015). Understanding and measuring entrepreneurial leadership style. *Journal of Small Business Management*, 53(1), 54–74. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12086>
- Santos, M. G. (2025). Integrating problem-based learning and AI in service-learning. *SSRN Working Paper*.
- Setyowati, E., & Permata, A. (2018). Service learning dan pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(2), 134–146.
- Thoah, A. F. K. (2023). Faith-based social entrepreneurship: Improving mosque's role in empowerment. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 8(1), 1–20.
- Tlaisy, H. A. (2019). Entrepreneurial leadership, patriarchy, and gender. *Journal of Small Business Management*, 57(1), 1–23. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12384>
- World Bank. (2020). *Women, business and the law 2020*. World Bank.